

Volume 3, No. 1, Nopember 2013

RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Tinjauan Historis Yuridis)

Muhammad Tahmid Nur

PEREMPUAN DALAM DUNIA BISNIS MENURUT PANDANGAN ISLAM

Ilham

Nining Permata Sari

DINAMIKA RELASI HUKUM DAN MORAL DALAM KONSEP JUAL BELI

(Studi Pada Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional

Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Muh. Darwis

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

DI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

Ahmad Syarief Iskandar

Nur'aeni

KOMPENSASI DALAM MANAJEMEN SDM

Muzayyanah Jabani



**DINAMIKA RELASI HUKUM DAN MORAL
DALAM KONSEP JUAL BELI
(Studi Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia
(DSN-MUI))**

Abstract

Sales and buy through financial institution syari'ah, specially bank of syari'ah of religious advices have by Council of Syari'ah of National of Moslem Scholar Ceremony' Indonesia (DSN-MUI). Religious advices of about sales released is not successive and each explaining its own the root of the matter. As opinion result punish the modern Islam, religious advices of DSN-MUI draw to be studied inductively to find the relationship dynamics punish and moral in sales concept.

Problems studied in this research there is two, that is 1. How related of transaction principles punish the Islam with the rule of religious advices in sales 2. How dynamics punish and moral in religious advices DSN-MUI?. This Research is bibliography research. Data used by in the form of data qualitative. Approach used by is philosophic normatif. Data gathered by analyzed by normative and philosophic of qualitative.

This research find the result 1. related between transaction principle in Islam law with the system and mechanism of banking syari'ah in rule of religious advices of DSN-MUI of about sales still in formal domain not yet substansial. Principal Formality punish the Islam used as by a base determine the sales procedures in financial institution of syari'ah of like price pixing, procedures of sales defrayal, fine the, currency sales, solving of debt of murabahah and scheduling repeat the defrayal murabahah. Relationship dynamics punish and moral in religious advices of about sales experience of the ebb. According to writer of religious advices of DSN-MUI transfer the classic ethics problem in fiqh go to the more advocating modern ethics of system of banking mechanism. Sales rule of performed within context of debt of fund receivable / money and bank syari'ah function as penyedia fund of non supplier. Result of opinion punish the Islam of religious advices of DSN-MUI of about sales succeed to avoid the lap forms, gharar and dharar formally, but not yet succeeded to uphold the esensi moral in sales. Moralitas And law still apart in its each domain.

Key Word: *Fatwa, DSN, Hukum, Moral, Jual Beli*

I. PENDAHULUAN

Jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan oleh al-Qur'an. Ia telah ada sebelum al-Qur'an diturunkan. al-

DAFTAR ISI

JURNAL MUAMALAH VOL.3, NO.1

Nopember 2013

PEREMPUAN DALAM DUNIA BISNIS MENURUT PANDANGAN ISLAM

Ilham

Nining Permata Sari

1-13

DINAMIKA RELASI HUKUM DAN MORAL DALAM KONSEP JUAL BELI (Studi Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN- MUI)

Muh. Darwis

14-27

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

Ahmad Syarief Iskandar

Nur'aeni

28-47

KOMPENSASI DALAM MANAJEMEN SDM

Muzayyanah Jabani

48-58

Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Historis Yuridis)

Muhammad Tahmid Nur

59-73

Qur'an mengatur *tijarah* (bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela (Q.S, 4: 29). (Departemen Agama RI, 1989: 122). al-Qur'an menggambarkan kekeliruan pandangan kaum *jahiliyah* yang menyamakan jual beli dengan *riba*. Jual beli ditegaskan oleh al-Qur'an sebagai lawan *riba*. Jual beli dinyatakan halal sedangkan *riba* dinyatakan haram (Q.S.2:275) (Departemen Agama RI, 1989: 69).

Nabi Muhammad menyebut jual beli *mabrur* sebagai salah satu usaha yang baik (al-'Asqalani, tt: 158). Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik *riba* (Sabiq, 2000: 88). *Riba* dalam jual beli adalah rambu-rambu yang sering diingatkan oleh Nabi. Dalam beberapa hadits, Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijual belikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung *riba* (al-Bukhari, t.th: 16,20,21). Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena *riba*, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*gharar*). Hal ini menunjukkan bahwa *riba* dan perbuatan terlarang lainnya bisa terjadi pada praktik jual beli, meskipun al-Qur'an menempatkan keduanya pada dua kutub yang berlawanan dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Tuntunan yang dikemukakan al-Qur'an dan Hadits memiliki latar belakang masyarakat Arab abad ke-7 M (Shihab, 1993: 89), termasuk di dalamnya kegiatan bisnis dan perniagaan. Pada masa itu model jual belinya banyak menggunakan cara barter, alat tukarnya menggunakan uang emas dan perak, belum dikenal lembaga keuangan sebagaimana pengertian modern. Meskipun al-Qur'an dan Hadits memiliki latar belakang sosial, kandungan al-Qur'an dan Hadits menjadi tuntunan umat manusia sepanjang zaman.

Dalam konsep ulama' fiqh, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi *dhahir* nampak lebih dominan dibandingkan sisi *bathin*. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, sah, batal, hak dan kewajiban. Ada model jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada *nash* (al-Qur'an dan Hadits) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. Ada akad *musammah*, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa Nabi dan akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru (Tsalabi, tth: 508).

Akad jual beli pada masa modern dipakai juga untuk akad pembiayaan di bank syari'ah (Antonio, 1999: 127). Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dalam

kegiatannya. Ia didesain untuk menghindari *riba*. Ia memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yaitu, menerima uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kepada masyarakat, melalui produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk jasa yang disediakan bank syari'ah (Antonio, 1999: 249). Pada konteks jual beli di bank syari'ah, nasabah penerima fasilitas pembiayaan menjadi pembeli barang dan bank syari'ah sebagai penjual barang dengan mekanisme perbankan sebagaimana lazimnya, diantaranya pembayaran model cicilan/angsuran. Keuntungan bank syari'ah dalam jual beli tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk prosentase atas harga pokok barang. (Karim, 2003: 110). Ada dua kubu pemikiran tentang penerapan prinsip syari'ah pada bank syari'ah. Pertama, mendukung dan yakin dengan didukung argumentasi bahwa bank syari'ah mampu menghindari *riba* (Consulting, 2001: 11). Kubu kedua, menganggap bank syari'ah gagal menghindari larangan *riba* (Saeed, 2003: 145).

Ada problem hukum dalam teknis pelaksanaan jual beli di bank syari'ah. 1. Bank syari'ah yang didesain untuk hanya mengeluarkan uang, bukan barang harus berfungsi sebagai penjual barang. Bagaimana jual beli didesain/ditata. 2. Bank syari'ah didesain sebagai lembaga bisnis yang menghasilkan keuntungan dari setiap aktifitas bisnisnya, dan ia dibatasi oleh beberapa hukum dan etika sesuai prinsip-prinsip hukum Islam yaitu larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *dhalim* dan menjual barang haram. Bagaimana cara bank syari'ah menarik keuntungan yang dibenarkan syari'at Islam. 3. Teknis pengembalian pembiayaan di bank syari'ah menggunakan cara pembayaran tunda dan cicilan. Bagaimana hal itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 4. Dalam hal jual beli secara tunda dan cicilan, muncul persoalan dengan batas waktu pembayaran dan besarnya pembayaran. Adakah kaitan antara besarnya kewajiban pembayaran dengan lamanya waktu yang disediakan bank syari'ah. Apa saja yang boleh dimasukkan sebagai unsur pendapatan bank syari'ah dalam melakukan jual beli dengan nasabah. Menurut penulis, problematika di atas adalah problem hukum dan moral dalam konsep jual beli DSN-MUI. Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar kegiatan bank syari'ah diambil dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) (Undang-undang, 2008: 18).

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar ada dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum Islam (ijtihad) yaitu para *mufti* (pemberi fatwa) dan *qadli* (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus (Mudzhar, 1993: 1-2).

Permasalahan yang timbul dari latar belakang di atas adalah, bagaimana Dinamika relasi Hukum dan Moral pada fatwa DSN-MUI tentang jual beli. Tulisan ini akan membahas permasalahan tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Jual Beli Dalam Kajian Fiqh.

1. Definisi Jual Beli Dan Kaidah Umum Jual Beli

Jual beli dalam istilah teknis fiqh menggunakan kata *bai'*. Kata tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh al-Qur'an dan Hadits. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu (al-Dimasyqi, t.th.: 239). Kata *bai'* dan *syira'* adalah dua kata yang artinya berlawanan, namun sering dipertukarkan maknanya dalam al-Qur'an dan Hadits, kadang kata *bai'* digunakan untuk makna *syira'*, dan kata *syira'* digunakan untuk makna *bai'* (Musa, t.th.: 133-234). Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta (Musa, t.th.: 234). Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual beli menurut Taqiyuddin adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pemanfaatan menggunakan cara ijab Kabul sesuai dengan tuntunan yang diperkenankan *syara'* (al-Dimasyqi, t.th.: 239). Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'* (Sabiq, 2000: 90). Kamil Musa mengutip pendapat Madzhab Hanafiyah yang sama dengan definisi yang dikemukakan Sayyid Sabiq (Musa, t.th.: 234).

Definisi jual beli yang mencantumkan "atas dasar kerelaan" menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, "saya jual" atau "saya beli", hal itu berarti pertanda (*imarah*) kerelaan, bukan *illat* adanya kerelaan. Menurut Kamil Musa hakekat kerelaan bukan bagian pemahaman jual beli menurut *syara'*, tetapi syarat adanya hukum jual beli menurut *syara'* (Musa, t.th: 235). Menurut Ibnu Abidin manakala kerelaan adalah bagian pemahaman jual beli menurut *syara'* maka jual beli yang terpaksa pasti batal, padahal jual beli tersebut adalah *fasid*, artinya jual beli terjadi walaupun *fasid*, oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung pada kerelaan (Abidin, t.th: 3).

Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara'* tersebut

berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab Kabul.

Rukun akad jual beli ada tiga. 1. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh. 2. Barang yang dijual belikan adalah barang yang boleh dijual belikan. 3. Ada *wasilah* yang diperkenankan oleh *syara'* dan wujud dalam akad seperti *sighat* berupa perkataan atau tulisan, termasuk *wasilah* saling memberi diantara kedua belah pihak (Musa, t.th.: 240). Syarat syah, yaitu sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan ia adalah bagian dari sesuatu tersebut. Manakala tidak terpenuhi syarat syah, jual beli masuk kategori *fasad*, sedangkan manakala tidak terpenuhi rukun jual beli menjadi *batal*.

Syarat syah jual beli ada dua belas. 1. Jual beli memenuhi rukun akad. 2. Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidak jelasan (*jahalah*), karena bisa menimbulkan perselisihan. 3. Harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan. 4. Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan *syara'*, karena jual beli menghendaki perpindahan kepemilikan sempurna. 5. Waktu pembayarannya diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. 6. Barang yang dijual belikan bisa diserahterimakan tanpa menimbulkan bahaya. 7. Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak. 8. Harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga. 9. Tidak ada *gharar* (sesuatu yang tidak jelas; barangnya atau akibatnya). 10. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi *fasad*. 11. Tidak ditemukan syarat yang rusak. 12. Tidak mengandung *riba* (Musa, t.th.: 241-244). Definisi *riba* menurut madzhab Hanafi adalah tambahan tanpa *iwadh* dalam pertukaran harta dengan harta. Menurut pendapat madzhab Syafi'i adalah akad *iwadh* khusus yang tidak diketahui kesepadanannya dalam standar syari'ah pada saat akad, atau disertai pengunduran waktu pertukaran keduanya atau salah satunya (Musa, t.th.: 253). Kedua definisi tersebut berpijak pada dasar adanya tambahan dan atau pengunduran waktu pertukaran sebagai penentu ada atau tidaknya *riba*. Definisi ulama' klasik di atas berbeda dengan pandangan kaum modernis yang melihat keharaman *riba* ada pada *kedhalimannya*, bukan semata-mata tambahannya. Mereka diantaranya adalah Fazlurrahman, Muhammad Asad, Sa'id al-Najjar, dan Abdul Mun'im al-Namr. Rasyid Rihho dan gurunya Muhammad Abduh berpendapat bahwa penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo dengan imbalan tambahan lagi, maka tambahan yang kedua adalah haram (Saeed, 2004: 62-64).

2. Jenis-jenis jual beli

Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing *fuqaha'*, disamping ada logika yang melatarbelakanginya. Kategorisasi pada kitab tertentu belum tentu sama dengan kitab lainnya. Kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang sederhana pembahasannya membagi jual beli menjadi tiga, seperti yang dilakukan Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*. 1. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut hukumnya boleh. 2. Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh. 3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh (al-Dimasyqi, t.th.: 239-240).

Kamil Musa membagi menjadi empat. 1. Jual beli *muqayadhadh* yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter. 2. *Sarf* yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya. 3. *Salam*. Jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad. 4. Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang) (Musa, t.th.: 216-233).

Menurut Ibnu Rusyd, setiap kegiatan *mu'amalah* yang melibatkan dua belah pihak, memiliki tiga kemungkinan. 1. Pertukaran barang dengan barang. 2. Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan. 3. Sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu dalam tanggungan. Ketiga kemungkinan tersebut adakalanya dilakukan secara kontan adakalanya dilakukan secara tangguh. Adakalanya kontan oleh kedua belah pihak, adakalanya tangguh oleh kedua belah pihak, adakalanya kontan oleh satu pihak sedangkan pihak yang lain tangguh. Jual beli barang atau tanggungan yang dilakukan secara tangguh oleh kedua belah pihak tidak diperkenankan oleh *ijma'* ulama', karena termasuk jual beli yang dilarang, yaitu utang ditukar utang. Ada beberapa nama jual beli menurut sifat dan keadaan akad. 1. Jual beli harga/uang dengan harga/uang disebut *sarf*. 2. Jual beli barang dengan uang/harga disebut jual beli mutlak, termasuk di dalamnya jual beli harga dengan barang yang menggunakan syarat. 3. Uang dengan barang yang dalam tanggungan disebut *salam*. 4. Jual beli *khiyar* (jual beli dalam perjanjian). 5. Jual beli *murabahah*. 6. Jual beli *muzayadah* (Rusyd, t.th: 93).

Kamil Musa lebih lanjut membagi jenis jual beli mutlak berdasarkan beberapa dasar pemikiran. Pertama, dilihat dari keabsahan akad, ada tiga. 1. Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat akad dan syarat syahnya akad. 2. Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang memenuhi syarat akad tetapi tidak memenuhi syarat syahnya akad. 3. Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat akad, baik memenuhi syarat syah atau tidak memenuhi syarat syah. Contohnya menjual atau membeli barang haram seperti

babi dan bangkai. Pembagian Kedua didasarkan pada lanjut dan tidaknya jual beli, ada dua. 1. Jual beli yang berlanjut yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan orang yang memiliki kewenangan menjual beli. 2. Jual beli *mauquf* yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan orang yang tidak memiliki kewenangan seperti anak kecil. Jual belinya tidak bisa lanjut kecuali atas persetujuan wali atau orang tuanya. Pembagian ketiga berdasarkan kepastian jual beli. 1. Jual beli pasti yaitu jual beli *shahih* dan tidak ada *khiyar* lagi. 2. Jual beli belum pasti yaitu jual beli *shahih* yang masih dalam *khiyar*. Pembagian keempat berdasarkan penyebutan ganti. 1. Jual beli *musawiyah* yaitu jual beli dimana penjual dan pembeli telah sepakat harga dan penjual tidak menyebut harga belinya (Jawa: kulakan). 2. Jual beli *murabahah* yaitu jual beli dengan member kelebihan/keuntungan. 3. Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan sesuatu yang ada padanya seperti dibayar pakai upah (Musa, t.th.: 245-249).

3. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab *fasid* (rusaknya jual beli), yaitu: 1. Barang yang dijual adalah haram. 2. *Riba*. 3. *Gharar*. 4. Syarat-syarat yang mengarah kepada *riba* dan *gharar*. Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada lagi faktor eksternal akad yang menyebabkan jual beli dilarang, yaitu *ghasy* (pemalsuan), *dharar* (bahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang diharamkan. Menjual barang yang dilarang ada dua kategori, yaitu barang najis dan barang tidak najis. Para ulama' sepakat melarang barang najis yang menimbulkan bahaya diperjual belikan seperti *khamr* (Jawa: arak), bangkai dan babi. Para ulama' berbeda pendapat tentang jual beli barang najis yang menimbulkan manfaat seperti pupuk (Rusyd, t.th: 94). Madzhab Syafi'i dan sebagian Maliki melarang jual beli barang najis meskipun bermanfaat, sedangkan sebagian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan Hanafi membolehkannya (al-Jaziri, 2003: 176-177). Para ulama' tidak sepakat melarang menjual barang yang tidak najis seperti anjing dan kucing (Rusyd, t.th: 94).

Para ulama' sepakat keharaman *riba* yang terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan atau yang lain. *Riba* pada tanggungan ada dua jenis. 1. *Riba jahiliyah* yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan. 2. Menunda. *Riba* pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan (Rusyd, t.th.: 96).

Gharar terjadi pada beberapa kasus. 1. Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas. 2. Terjadi pada kasus harga dan barang yang

dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda. 3. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang. 4. Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya. Diantara jual beli yang mengandung ciri-ciri *dharar* di atas ada yang disebut namanya dalam *nash* (Hadits) dan jual beli yang tidak disebut namanya oleh *nash*. Jual beli yang disebut namanya oleh *nash* adalah tradisi *jahiliyah* yang dilarang Nabi, para ulama' sepakat terhadap larangannya, seperti 1. Jual beli hewan dalam kandungan dengan sebutan *bai' al-habl al-hablah*, baik bayi hewan dalam kandungan yang disebut *madhamin* maupun hasil peranakan pejantan yang disebut *mulaqih*. 2. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli barang dengan cara disentuh pada malam hari yang gelap hingga tidak diketahui sejatinya barang tersebut. 3. Jual beli *munabadhah* yaitu penjual dan pembeli saling melempar barang hingga tidak jelas barang yang mana yang dipertukarkan. 4. Jual beli *Khashat* yaitu jual beli dengan cara melempar batu pada dagangan dan yang kena berarti yang dibeli dan wajib dibeli. 5. Jual beli menggunakan dua akad yang diberi sebutan *bai'atami fi ba'iatin*. 6. Jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya. Jual beli yang tidak disebut namanya oleh *nash* ulama' berbeda pendapat (Rusyd, t.th.: 111).

B. Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI

1. Mekanisme penetapan Fatwa DSN-MUI

Kehadiran fatwa DSN-MUI adalah kebutuhan para praktisi ekonomi syari'ah dalam melakukan kegiatan transaksi, khususnya di lembaga keuangan syari'ah (LKS). Keinginan membuat lembaga fatwa berskala nasional diwujudkan pada tahun 1999 M. Dalam lokakarya ulama' tentang reksadana syari'ah pada tanggal 29-30 Juli 1997, merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar rekomendasi tersebut, MUI membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI no. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Anggota DSN terdiri dari para ulama', praktisi dan pakar yang terkait dengan *muamalah syari'ah*. Mereka ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk empat tahun (Barlinti, 2010: 145-146).

Tugas DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa dan mengawasi penerapan fatwa. Secara rinci ada 3 tugas DSN-MUI. 1. Menumbuhkan kembangkan nilai syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah dan lembaga perekonomian non keuangan. 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah. 3. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan (Keputusan, 2000: 2). Dalam mekanisme kegiatan tugas DSN-MUI, keberadaan DPS di setiap LKS,

ditempatkan pada salah satu pelaksana tugas DSN-MUI yaitu sebagai pengawas pelaksanaan fatwa DSN-MUI (Barlinti, 2010: 146).

Kewenangan DSN-MUI sangat kuat dalam menata pelaksanaan nilai-nilai syari'ah pada LKS. Menurut keputusan DSN-MUI no.1 tahun 2000, ia memiliki enam kewenangan. 1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan BI (Bank Indonesia). 3. Memberi rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai DPS pada suatu LKS. 5. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan, dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri. 5. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. 6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (Keputusan, 2000: 3).

Tugas mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan keuangan syari'ah serta produk dan jasa keuangan syari'ah memerlukan serangkaian proses. Ia dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri semua anggota DSN-MUI, Bank Indonesia (BI) atau lembaga keuangan lainnya dan pelaku bisnis syari'ah.

Alur penetapan fatwa DSN-MUI secara urut sebagai berikut. Pertama, badan pelaksana harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk LKS. Usulan bisa disampaikan melalui DPS yang ada pada setiap LKS atau bisa disampaikan secara langsung kepada sekretariat badan pelaksana harian (BPH) DSN-MUI. Kedua, sekretariat yang dilaksanakan oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan wajib menyampaikan permasalahan kepada ketua. Ketiga, BPH DSN-MUI bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja wajib membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut. Keempat, ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke rapat pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan. Kelima, memorandum yang telah mendapat pengesahan rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN - MUI dengan ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officio* ketua umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (*ex officio* sekretaris umum MUI) (Barlinti, 2010: 158-159).

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli

Fatwa tentang jual beli menyebar dalam beberapa tahun dan tidak beriringan. Penulis menemukan 14 Fatwa DSN-MUI tentang jual beli, yaitu: fatwa tentang jual beli *murabahah*, jual beli salam, jual beli *istisna'*, uang

muka dalam *murabahah*, diskon dalam *murabahah*, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa tentang jual beli *istisna'* parallel, fatwa tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*, fatwa *ijarah muntahiyyah bittamlik*, jual beli mata uang, potongan tagihan *murabahah*, penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan konversi akad *murabahah*.

Fatwa tentang jual beli dikelompokkan pada dua bagian, yaitu proses akad jual beli dan pasca akad jual beli. Fatwa-fatwa proses akad adalah fatwa Jual beli fatwa *ijarah muntahiyyah bittamlik*, jual beli *sarf*. Fatwa – fatwa tentang pasca akad adalah sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, potongan pelunasan dalam *murabahah*, tagihan *murabahah*, piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan konversi akad *murabahah*.

Fatwa tentang jual beli berisi tentang aturan pelaksanaan akad menurut jenisnya masing-masing. Jual beli di bank syari'ah harus bebas praktek riba. Secara umum pelaksanaan jual beli di bank syari'ah mengharuskan bank membeli dulu barang yang dikehendaki nasabah. Dalam pengadaan barang, bank syari'ah diperkenankan mewakili kepada nasabah Uang (kulakan) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Harga yang disepakati adalah jumlah utang yang tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan pihak ketiga (Himpunan, 2006: 24-27).

Utang *murabahah* wajib dibayar oleh nasabah sesuai waktu dan jumlah yang disepakati. Nasabah yang mampu namun menunda untuk membayar boleh diberi sanksi berupa pembayaran sejumlah dana, sesuai kesepakatan. Sanksi tersebut wajib diperuntukkan sebagai dana social. Nasabah yang tidak/belum mampu karena *force majeure* tidak boleh diberi sanksi (Himpunan, 2006: 110-111).

Bank syari'ah boleh memberi potongan pelunasan bagi nasabah yang melunasi hutangnya sesuai waktu atau lebih cepat (Himpunan, 2006: 144). Bank syari'ah juga boleh memberi potongan dari total pembayaran kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilan dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Syarat yang harus dipenuhi dalam memberi potongan tersebut adalah tidak boleh diperjanjikan pada saat akad (Himpunan, 2006: 190).

Utang nasabah yang tidak mampu dilakukan dengan cara penjadwalan ulang, konversi akad *murabahah* atau penjualan barang jaminan. Manakala bank syari'ah harus menyelesaikan dengan menjual barang jaminan maka harus dilakukan dengan mengacu harga pasar, baik dilakukan oleh nasabah atau bank syari'ah. Jika ada sisa hasil penjualan dari kewajiban utang, maka sisa tersebut menjadi hak nasabah. Manakala hasil penjualan tersebut kurang

untuk membayar utang, maka nasabah memiliki kewajiban untuk melunasinya atau bank syari'ah membebaskannya (Himpunan, 2006: 353-354). Manakala bank syari'ah menggunakan cara penjadwalan ulang pembayaran utang maka tidak boleh mengikutinya dengan penambahan jumlah utang awal (Himpunan, 2006: 359). Manakala bank syari'ah memilih konversi akad *murabahah*, maka ada dua cara. 1. *Murabahah* dihentikan dengan cara menjual jaminan. Jika masih ada sisa setelah untuk membayar utang maka sisa tersebut menjadi uang muka akad *ijarah* atau bagian modal musyarakah. 2. bank dan nasabah eks *murabahah* bias membuat akad baru; a. *ijarah muntahiyah bittamlik*, b. *mudharabah* atau c. *musyarakah* (Himpunan, 2006: 365-366).

3. Dinamika Hukum dan Moral Dalam Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI

Kerangka dasar pemikiran fatwa DSN-MUI adalah kerangka fiqh, yaitu memuat dimensi hukum dan moral, namun menempatkan keduanya secara berbeda. Ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI memiliki dasar pijakan etik yang diambil nash dan mengedepankan legal formal hukum sebagai tuntutan kepastian yang diembannya.

Pernyataan fatwa tentang jual beli sangat formal. Kontrak jual beli dilakukan dengan prosedur khusus dan memastikan akurasi obyek pembiayaan. Bank wajib membeli dulu barang yang hendak dibeli nasabah. Kontrak seperti itu juga terjadi di lembaga keuangan konvensional, yaitu *leasing*. Kontrak yang dipakai juga mirip. *Leasing* menggunakan kontrak sewa beli, bank syari'ah umumnya menggunakan kontrak *murabahah*. Fatwa mengatur kontrak yang hampir sama dengan sewa beli, yaitu *ijarah muntahiyah bittamlik*. Menurut penulis fatwa mengatur prosedur kontrak sebagai bentuk perubahan system pembiayaan konvensional.

Fatwa DSN-MUI belum menyentuh substansi menghindari riba dan syarat yang mengarah kepada riba. Harga yang ditetapkan dan system yang digunakan berpotensi menganiaya nasabah sebagaimana bank konvensional. Harga barang dengan jumlah utang nasabah bisa memiliki selisih besar, sehingga tidak sama antara harga dan barang yang dihargai. Hutang nasabah yang timbul akibat akad jual beli bukan sewa modal. Maka bank syari'ah tidak wajib memberi potongan untuk pelunasan yang dipercepat. Bank syari'ah hanya diperkenankan memberi potongan. Ketentuan fatwa DSN-MUI dalam persoalan ini menyalahi kebiasaan transaksi perbankan. Fatwa mengedepankan kepastian harga dalam transaksi sewa modal.

Fatwa tentang jual beli menegakkan kontrak yang menghindari *gharar* (tidak jelas/tidak pasti) soal harga, waktu pembayaran dan barang yang dibeli dan membeli barang haram. Substansi riba ada pada harga dan margin, sedangkan fatwa DSN-MUI lebih menekankan pengaturan prosedur jual beli,

harga dan margin diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dijadikan sarana mencapai *an taradhin*. Persoalan baru muncul, *an taradhin* hanya berlaku dalam persoalan *mubah*, bukan pada persoalan haram. Riba adalah persoalan haram dan termasuk *haqqullah*. Persoalan bank syari'ah dan bank konvensional terbelenggu oleh keputusan hukum yang menyatakan Bunga adalah riba. Bank syari'ah masih formalitas dalam menghindari riba dengan menetapkan kepastian obyek pembiayaan dan mendasarkan kelebihan pengembalian atas pinjaman didasarkan pada kontrak jual beli, berdasarkan firman Allah, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Formalitas jual beli di bank syari'ah menantang untuk disempurnakan dengan aturan yang lebih tegas pada pengaturan *margin* dan penegakan persyaratan nasabah (5C) agar dapat menghindari kezaliman.

Dinamika hukum dan moral nampak pasang surut pada ketentuan pasca kontrak. Fatwa DSN-MUI jelas sekali menegaskan moralitas pengembalian hutang jual beli. Nasabah yang mengalami *force majeure* harus diberi tenggang waktu untuk membayar hutangnya tanpa dikenai tambahan dan denda. Denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah mampu bayar namun menunda atau tidak mau membayar. *Rescheduling* tidak boleh dibarengi dengan penambahan harga. Ketentuan di atas menunjukkan moralitas pada ketentuan pasca akad jual beli. Karakter bank syari'ah sebagai lembaga penyedia dana meniscayakan adanya penjadwalan ketat dalam pengembalian dana dari nasabah.

Fatwa DSN-MUI nampak ambigu dalam menghadapi karakter bank syari'ah di atas. Fatwa memberi peluang untuk adanya pelelangan jaminan dan konversi utang sebagai jalan keluar bagi nasabah yang tidak mampu bayar. Ketentuan ini nampak jelas dan tegas dalam mengatur penyelesaian nasabah bermasalah. Ketentuan di atas menemukan kerumitannya manakala dikombinasikan dengan ketentuan fatwa tentang penundaan pengembalian hutang. Kapan penundaan bisa dilakukan dan kapan lelang atau konversi dijalankan, mengingat dalam konsideran pelelangan dan konversi, hal tersebut dilakukan untuk nasabah yang tidak mampu bayar sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.

Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan pasca akad berusaha menegaskan moralitas dan kezaliman pada salah satu pihak, dalam melaksanakan penjualan agunan. Dalam mengizinkan penjualan agunan untuk pelunasan hutang, fatwa menegaskan harga pasar sebagai patokan harga jualnya. Manakala ada sisa harga jual setelah digunakan untuk melunasi hutang, maka menjadi hak nasabah, manakala harga kurang untuk bayar utang maka nasabah masih tetap terbebani sisa hutangnya atau bank syari'ah membebaskannya.

Fatwa DSN-MUI di satu sisi menegaskan moralitas dengan ketentuan yang jelas dan tegas dan di sisi lain fatwa DSN-MUI melindungi system perbankan

yang mengharuskan kepastian pengembalian hutang. Menurut penulis, dalam situasi tersebut, fatwa DSN-MUI mengambil jalan tengah dengan menempatkan harga pasar sebagai solusi untuk mencegah munculnya kezaliman oleh salah satu pihak.

III. Kesimpulan

1. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli secara formal menempatkan prinsip-prinsip transaksi dalam hukum Islam. Larangan garar dan memperjualbelikan barang haram sangat tegas dinyatakan. Riba dan persyaratan yang mengarah ke riba diwujudkan dalam bentuk mekanisme jual beli, tidak pada pengaturan margin.

2. Hukum dan moral pada fatwa DSN-MUI memiliki dinamika pasang surut. Moralitas pada kontrak pasca kontrak ditegaskan dalam ketentuan fatwa. Fatwa DSN-MUI membolehkan penyelesaian hutang dengan cara menjual jaminan dan konversi hutang. Ketentuan fatwa memberi solusi kerumitan pelaksanaan moralitas dengan menegaskan kewajiban berpegang pada harga pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, t.th, *Radd al-Mukhtar*, Juz. 4, Dar al-Fikr.
- al-Asqalani, t.th, al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga.
- al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mughirah Ibnu Bardazabat, t.th, *Al-Bukhari Masykul Bi Hasyiyah al-Sanad*, Juz. 2, Beirut, Dar al-Fikr.
- al-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Hasini al-Hashni, t.th, *Kifayah al-Ahyar Fi Halli ghayah al-Ikhtishar*, Dar Ikhya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*, Juz. 2, Dar al-Taqwa Li al-Thab'I Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi'.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Wacana Ulama' dan Cendekia*. Copyright@muhammad Syafi'i Antonio.
- Barlinti, Yeni Salma, 2010, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.

- Consulting, Karim Busines, 2001, *Islam Dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2006, Jakarta, Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor 1 Tahun 2001.
- Mudzhar, Atho', 1993 *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta, INIS XVII.
- Musa, Kamil, t.th., *Al-Ahkam al-Mu'amalah*, Mu'assasah al-Risalah.
- Rusyd, Ibnu, t.th., *Bidayah al-Mujtahid*, Juz.3, Beirut, Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, 2000, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fatih.
- Saeed, Abdullah, 2003, *Islamic Banking And interest A Studi of Riba And Its Contemporary Interpretation*, terj. Muhammad Ufuqul Mubin dkk, *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Shihab, Quraish, 1993, *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung, Mizan.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Tsalabi, Muhammad Mustofa, 1964, *al-Madkhal Fi Ta'rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa'id al-Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah*, Mathba'ah Dar al-Ta'rif.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah.

IAIN PALOPO